BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi ini perkembangan dunia begitu cepat baik itu aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dll. Oleh karena itu pemerintah beserta elemen-elemen dibawahnya termasuk masyarakat ikut andil dalam pemeliharaan dan perkembangan di bumi pertiwi ini. Penyelenggaraan pemerintahan di ajukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam suatu sistem pengelolaan negara, termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik keuangan pusat dan keuangan daerah.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945, keuangan daerah yang di dalamnya termasuk keungan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan degan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Lembaga atau instansi pemerintahan merupakan salah satu badan yang juga mengolah/memproses sistem keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran kasnya menggunakan Sistem Akuntansi.

Sistem akuntansi pengeluaran kas pemerintahan daerah haruslah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tentang perbendaharaan negara dan diterapkan

sesuai ketentuan Permendagri 13 Tahun 2006. Dari segi pelaksanaan anggaran mengacu pada peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor: 66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN dan laporan keuangan yang wajib dibuat setiap periodenya adalah berupa realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Jika suatu sistem akuntansi pada pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan dengan baik maka akan adanya penyimpangan seperti fenomena yang terjadi pada Dinas ESDM Anambas. Dalam hasil audit BPK RI menyimpulkan, Dinas ESDM Anambas mencairkan dana APBD tanpa memenuhi prosedur mekanisme APBD. Salah satu contohnya, pencairan dana yang dikeluarkan dari rekening BUD kepada sekretariat daerah. BPK menilai, dalam hasil pemeriksaannya, semua penerimaan maupun pengeluaran kas daerah atas beban APBD yang dilakukan melalui rekening kas umum daerah tidaklah memenuhi prosedur mekanisme. Maka yang terjadi menyulitkan pengendalian dan berpotensi terjadi penyimpangan penggunaannya. Begitupun transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang jumlahnya sebesar Rp 2,590 miliar tidak tercatat dalam laporan realisasi Anggaran TA 2010 karena tidak ada pembebanan ke APBD berdasarkan SP2D dan SPM. Dikarenakan untuk pengeluaran kas daerah sendiri, pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Pengeluaran daerah didahului dengan permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU. (Sumber: Harian Jaya Pos, Januari 2012)

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat adalah entitas akuntansi dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang mendapatkan pelimpahan wewenang beserta pendanaannya. Dengan adanya pelimpahan wewenang atas dana yang diberikan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, maka entitas akuntansi tersebut diharuskan untuk membuat suatu pertanggungjawaban atas penggunaan dana, yaitu berupa laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat sebagai laporan pertanggungjawaban, agar pemberi dana mengetahui untuk apa saja dana tersebut dialokasikan maka setiap pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran maupun kebijakan dari kuasa pengguna anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel sehingga dapat mengurangi adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, juga sebagai bahan informasi pengguna laporan yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam pengeluaran kas.

BPLHD Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan aktivitasnya, memerlukan suatu sistem operasional kegiatan guna terlaksananya program kerja tersebut. Berbagai jenis sistem penunjang program kerja, salah satunya adalah pengeluaran kas. Apabila pengelolaan sistem akuntansi pengeluaran kas dilakukan secara baik maka akan memperlancar kinerja organisasi, oleh sebab itu diperlukan sistem yang baik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas yang sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengeluaran kas instansi pemerintahan, oleh karena itu penulis mengambil judul:

"TINJAUAN ATAS SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BPLHD) PROVINSI JAWA BARAT".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis akan mengidentifikasikan masalah yaitu apakah dalam pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPLHD Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yg telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan sistem akuntansi pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat?
2. Dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan sistem akuntansi pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu instansi pemerintah yaitu Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Naripan No. 25 Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Dalam waktu yang digunakan dalam Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret sampai Juli 2013. Adapun kegiatan penyusunan kegiatan terlihat pada tabel 1.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Maret 2013	April 2013	Mei 2013	Juni 2013	Juli 2013	Ags 2013
I	**Tahap Pendahuluan**						
	1. Membuat outline dan proposal TA						
	2. Mengambil form penyusunan TA						
	3. Menentukan tempat penelitian						
II	**Tahap Pelaksanaan:**						
	1. Mengajukan outline dan proposal TA						
	2. Bimbingan proposal						
	3. Penelitian dan Pengumpulan data						
	4. Penyusunan Tugas Akhir						
III	**Tahap Pelaporan**						
	1. Menyiapkan draft Tugas Akhir						
	2. Sidang akhir Tugas Akhir						
	3. Penyempurnaan Laporan Tugas Akhir						
	4. Penggandaan Tugas Akhir						